



**BULETIN**

# PARLEMENTARIA

NOMOR: 799/1/2014

III/JANUARI 2014



## DPR Sepakat Potong Gaji Untuk Bencana Sinabung



# KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA JANUARI 2014

Minggu Ketiga Januari 2014 berisikan laporan kegiatan Rapat Paripurna, Rabu 15 Januari yang memiliki acara tunggal, yaitu pidato pembukaan Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 2013-2014

## Rapat paripurna DPR RI 15 Januari 2014

Pada awal pidato, Ketua DPR menyampaikan pemberitahuan adanya delapan surat masuk, yaitu; surat masuk dari Komisi Yudisial Perihal pengajuan nama Calon Hakim Agung periode II tahun 2013; surat dari Presiden RI perihal penunjukan Menteri untuk pembahasan RUU tentang perubahan atas UU No.27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan perihal penunjukan Menteri untuk pembahasan 65 RUU tentang pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota; surat dari Presiden RI perihal permohonan pertimbangan pemberhentian Hj. Azlaini Agus, S.H.,M.H sebagai Wakil Ketua merangkap anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI); surat dari Wakil Ketua BPK RI perihal usulan tiga nama Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan BPK RI tahun anggaran 2013; surat dari Ketua KY perihal permintaan calon anggota Panel Ahli Calon Hakim Konstitusi dan surat-surat dari Presiden perihal permintaan pertimbangan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara sahabat untuk RI, yaitu Spanyol, Srilanka dan Republik Montenegro.

Ketua juga memperkenalkan dua anggota PAW dari Partai Demokrat yang telah diambil sumpahnya pada tanggal 31 Desember 2013 dan 15 Januari 2014 atas nama Saudara Suparman menggantikan H.Sofyan Ali serta Saudara Nor Baiti, menggantikan H. Yusran Aspar.

Ketua DPR pada awal pidato menyampaikan harapan, semoga tahun 2014 menjadi tahun yang penuh rahmat, dijauhkan dari berbagai gejolak yang mengancam sendi-sendi persatuan bangsa. Tahun 2014 adalah tahun politik, karena akan berlangsung dua agenda politik lima tahun-

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



an dalam rangka membangun demokrasi, yaitu Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014 serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli 2014. Oleh karena itu, tahun 2014 memiliki tantangan, namun sekaligus juga harapan. Tantangan, karena bangsa Indonesia harus dapat membuktikan bahwa proses demokrasi akan berjalan semakin baik, harapan, karena Pemilu dapat melahirkan para negarawan yang berkualitas dan amanah, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Segenap komponen bangsa diharapkan dapat mengawal dua agenda politik tersebut, sehingga dapat berjalan dengan baik untuk menuju Indonesia yang adil dan sejahtera, sehingga menjadi negara yang disegani oleh bangsa-bangsa di dunia.

### Fungsi legislasi

Pada masa persidangan III, pelaksanaan fungsi legislasi akan difokuskan untuk menyelesaikan 66 (enam puluh enam) RUU yang sudah diputuskan menjadi RUU prioritas tahun 2014. RUU tersebut terdiri dari 34 (tiga puluh empat) RUU yang telah memasuki Pembicaraan Tingkat I, sisanya adalah RUU yang sedang dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR maupun dalam tahap penyusunan, baik di DPR maupun di Pemerintah dan DPD.

Pimpinan Dewan meyakini bahwa, paling tidak 34 (tiga puluh empat) RUU yang sudah memasuki Pembicaraan Tingkat I, mampu diselesaikan pada periode DPR sekarang, dengan meminimalisasi kendala dalam proses pembahasan, baik yang datang dari Dewan maupun kendala dari Pemerintah, khususnya masih adanya ketidaksepakatan mengenai substansi pokok. Pimpinan mengharapkan kendala ini segera dilaporkan agar segera dicari solusi pemeca-

hannya. Sejumlah RUU yang segera dapat diselesaikan antara lain RUU tentang Keperawatan, RUU tentang Perdagangan, RUU tentang Perbankan, RUU tentang Perubahan Harga Rupiah, dan RUU tentang Perubahan atas UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Mengenai pembentukan DOB, DPR dan Pemerintah akan melanjutkan proses pembahasan dengan memprioritaskan daerah-daerah yang memenuhi syarat untuk dimekarkan, dilakukan secara selektif, mempertimbangkan urgensi dan kepentingan nasional serta tidak mengganggu proses penyelenggaraan Pemilu 2014.

### Fungsi Anggaran

Dewan akan mengamati pelaksanaan APBN 2014. Selain parameter indikator ekonomi makro yang masih belum membaik, juga mengamati tantangan yang akan dihadapi sehubungan semakin terbatasnya ruang fiskal APBN, dimana komposisi belanja negara masih didominasi oleh belanja non diskresi, seperti belanja pegawai, pembayaran hutang dan subsidi. Selain itu, juga meminta perhatian adanya *mandatory spending*, yaitu belanja yang harus dialokasikan karena perintah UUD 1945, seperti anggaran pendidikan 20 persen dari APBN, anggaran kesehatan lima persen dari APBN, DAU sekurang-kurangnya 26 persen dari penerimaan dalam negeri netto, Otsus Aceh dan Papua masing-masing 2 persen dari DAU. Konsekuensi *mandatory spending* tadi berdampak pada terbatasnya alokasi anggaran yang bersifat lebih produktif, sehingga APBN tidak dapat berfungsi optimal.

Ketua menyatakan bahwa dalam kaitan tekanan terhadap rupiah, yang terjadi sepanjang tahun 2013, Dewan sangat prihatin. Rata-rata kurs Rupiah sudah berada di level Rp.12.000,- lebih, jauh di atas patokan dalam APBN. Untuk itu Pemerintah dan pelaku usaha perlu mewaspadaai dampak gejolak kurs Rupiah terhadap perekonomian dalam negeri. Dewan terus mendorong Pemerintah untuk tetap menjaga volatilitas kurs Rupiah paling tidak mendekati Asumsi APBN Tahun Anggaran 2014. Di sisi lain, momen depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS

dapat memberi peluang peningkatan ekspor non-migas pada tahun 2014, karena harga produk ekspor Indonesia cukup kompetitif di pasar internasional.

### Fungsi Pengawasan

Dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan, tim-tim Pengawas DPR yang telah dibentuk yaitu; (1) Timwas Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria, yang akan menangani berbagai permasalahan pertanahan yang sangat kompleks dan akan fokus kepada penyelesaian RUU tentang Pertanahan, RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (2) Timwas Perlindungan TKI. Tim ini akan mendorong percepatan penyelesaian pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 tahun 2005 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri (3) Tim pemantau pelaksanaan UU No.11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan UU No.21 tahun 2011 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, setelah diterbitkannya Inpres No.5 tahun 2007 tentang Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (4) Tim Pengawas Penyelesaian Kasus Bank Century (Timwas Century) yang masih akan melanjutkan tugasnya. Antara lain; berkaitan dengan masalah penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum, *asset recovery*, dan pengembalian dana nasabah PT Antaboga.

Ketua menyampaikan harapannya terhadap dua lembaga baru yang sejak Januari 2014 akan beroperasi penuh, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). OJK akan melaksanakan tugas dan wewenangnya terkait pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap seluruh lembaga keuangan dan pasar modal di tanah air, termasuk lembaga perbankan. Khusus mengenai tugas dan wewenang pengaturan, pembinaan, dan pengawasan lembaga perbankan

yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia, maka kini OJK diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, dalam upaya memperkuat struktur industri keuangan dan perbankan dalam negeri. Presiden telah melakukan sosialisasi terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan. Aspek regulasi terhadap JKN adalah UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 Tahun



2011 tentang BPJS Per 1 Januari 2014. PT. Askes telah menjadi BPJS Kesehatan yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan sosial kesehatan. Tantangan mengelola peserta dari 16,4 juta jiwa menjadi 121,6 juta jiwa pada tahun 2014, bukanlah hal yang mudah. Sebuah UU tidak akan berjalan baik tanpa diiringi oleh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang saling mendukung satu sama lain.

Untuk menunjang terselenggaranya Jaminan Kesehatan Nasional diperlukan adanya *database* orang-orang miskin dan orang-orang yang berhak atas jaminan sosial. Terkait dengan bertambahnya jumlah orang miskin dan dimulainya program JKN tersebut, maka Dewan mendesak Pemerintah untuk melakukan koordinasi sebaik-baiknya dalam pelayanan kesehatan guna meminimalisir kendala di lapangan. Dewan menaruh harapan bahwa BPJS dapat bekerja optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh manfaat dari adanya program JKN.\*\*

# DPR Sepakat Potong Gaji Untuk Bencana Sinabung



Anggota Partai Demokrat Heriyanto.

Rapat Paripurna DPR menyepakati pemotongan gaji pokok anggota Dewan sebesar 25 persen untuk bencana Gunung Sinabung, Karo, Sumut. “Apakah semua setuju untuk dipotong 25 persen dari gaji pokok,” tanya Ketua DPR Marzuki Alie dihadapan Sidang Paripurna DPR, di Gedung Nusantara

II, Rabu, (15/1). Kemudian anggota Dewan ramai-ramai menyatakan setuju terhadap usulan tersebut.

Sebelumnya, anggota DPR Heriyanto dari Partai Demokrat mengusulkan agar Dewan segera melakukan action gerakan moral untuk korban Gunung Sinabung. “Mari kita ramai-ramai memotong gaji kita 25 persen untuk para korban,” katanya.

Sementara anggota DPR Hetifah (F-PG) mengatakan, dirinya mendukung adanya pemotongan 25 persen tersebut. Namun yang penting perlu dukungan pembenahan infrastruktur bagi daerah pasca bencana Gunung Sinabung.

Khusus UU Otda, Jelas Hetifah, pembentukan daerah otonomi baru harus memprioritaskan daerah perbatasan dan yang telah memenuhi syarat serta mendesak segera dimekarkan, misalnya daerah perbatasan, Pulau se-

batik yang ingin menjadi kota. “Jangan sampai daerah yang urgensi telah memenuhi syarat tidak diputuskan segera,” jelasnya.

Penanganan bencana Sinabung memang memerlukan perhatian yang lebih besar baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan data yang dihimpun Palementaria, letusan Gunung Sinabung telah berlangsung empat bulan lebih atau sejak 15 September 2013, hingga kini masih aktif mengeluarkan erupsi awan panas dan debu vulkanik.

Dampak dari letusan juga besar selain harta benda, juga korban meninggal sebanyak 16 orang dan jumlah pengungsi mencapai 26.088 jiwa. Selain itu sebagian besar pengungsi kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian akibat ladang, sawah dan kebunnya tidak bisa diolah lagi bahkan yang sudah berbuah terancam gagal panen. (si) Foto: Tim Parle.

# UU Desa Titik Awal Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Desa

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Desa, Ibnu Munzir mengatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari masyarakat pedesaan. Undang-Undang ini dianggap sebagai titik awal kebangkitan ekonomi masyarakat di tingkat desa.

“UU Desa ini salah satu karya besar dari DPR. Sebab, UU ini pertama kali ada di sepanjang republik ini berdiri. Bahkan, beberapa kali kunjungan saya ke daerah pemilihan (dapil-red) termasuk dapil teman-teman DPR dari fraksi lain yang mengundang saya untuk sosialisasi UU ini, sambutannya sangat antusias,” kata Ibnu Munzir kepada Parlemen, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Menurut Ibnu Munzir, kehadiran UU Desa bukan sekadar pemberian ke-luasan bagi rakyat di desa untuk lebih berkembang, melainkan juga sebagai tonggak sejarah. Masyarakat desa berkesempatan untuk memperbaiki kehidupannya, sehingga tidak lagi berbondong-bondong hijrah ke kota untuk mencari lapangan pekerjaan.

“Yang saya tangkap dari masyarakat desa atas UU ini adalah bahwa UU ini merupakan titik awal kebangkitan ekonomi di desa. Saya melihatnya bahwa UU ini secara perlahan akan mencegah urbanisasi ke kota yang begitu deras, meski memang harus ada UU lain yang mengatur agar proses pemerataan pembangunan bisa berjalan baik,” katanya.

Meski disambut secara antusias, Ibnu Munzir mengakui ada kesan yang bergema di ruang publik terkait kekhawatiran banyak kalangan soal “potensi korupsi” yang juga akan merambah dalam pemerintahan desa terkait ketentuan dalam UU Desa tentang pengalokasian dana APBN untuk desa.



Wakil Ketua Pansus RUU Desa, Ibnu Munzir.

Seperti diketahui, lebih dari 70.000 desa akan mendapat alokasi anggaran APBN sebesar 10 persen dari dana transfer daerah dalam APBN. Setiap desa bisa mengelola anggaran hingga Rp1,4 miliar setiap tahun, meski tidak sama setiap desa karena didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi desa, dan kesulitan geografis.

Bukan hanya itu, dalam anggaran APBD, setiap desa juga dimungkinkan mendapat kucuran dana dari APBD provinsi dan kabupaten/kota. Menurut UU Desa, setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib menganggarkan pembangunan desa di APBD sesuai kemampuan masing-masing daerah.

Politisi dari Partai Golkar itu menganggap perlu ada langkah-langkah preventif dalam pengelolaan anggaran desa yang begitu besar, sebagaimana

yang diamanatkan dalam UU tersebut. “Kalau selama ini mereka (desa-red) mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) 100 juta sampai 200 juta bahkan ada satu desa yang hanya memiliki ADD Cuma 50 juta rupiah, tiba-tiba sekarang mereka dapat 1,4 milyar, tentu ini harus ada perencanaan-perencanaan yang baik,” ujarnya.

Ibnu Munzir meyakini jika pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan anggaran itu berjalan secara transparan, dirinya yakin masyarakat desa bisa mengelola dana itu secara baik. “Kalau musyawarah desa berjalan secara baik ditambah mekanisme kontrol dari masyarakat setempat juga berjalan, saya rasa tidak perlu dikhawatirkan. resiko itu tetap ada, sepanjang aparat desa bekerja sesuai prosedur,” katanya. (nt)

Foto: HR/parle/odjie.

# BK DPR akan Selesaikan Semua Pengaduan Masyarakat



Ketua BK Trimedya Panjaitan.

Badan Kehormatan - BK DPR berkomitmen untuk menuntaskan seluruh pengaduan yang telah disampaikan masyarakat. Namun memasuki tahun politik penjaga citra dewan ini harus berhati-hati karena sejumlah

laporan masuk, terindikasi persaingan antara caleg pada daerah pemilihan yang sama.

“Pokoknya pengaduan yang memiliki bukti lengkap harus diselesaikan apapun bentuk penyelesaiannya. Namun kami harus hati-hati menyangkut anggota dewan jangan sampai dipolitisasi karena menjelang pemilu. Kami menerima pengaduan menyangkut anggota dewan yang melaporkan itu satu partai dengannya. Kami tidak mau BK dijadikan sebagai alat persaingan antar caleg di dapil masing-masing,” kata Ketua BK Trimedya Panjaitan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/14).

Ia menambahkan pengaduan yang telah mempunyai bukti lengkap segera memasuki tahap pemeriksaan para pihak diantaranya dugaan pelecehan rasial yang dilakuka anggota Komisi III

Ruhut Sitompul terhadap pengamat politik Boni Hargens dan pengaduan terkait sengketa bisnis yang melibatkan anggota Komisi VII Sukarnotomo.

“Kasus video asusila yang diduga melibatkan anggota Komisi IX Karoline Margret Natasa kita masih kesulitan menghadirkan saksi ahli. 3 orang yang sudah kita undang ternyata tidak bersedia dan ada yang keberatan. Kita cari saksi ahli lain, mudah-mudahan waktunya cukup,” lanjutnya.

Sementara itu, bicara pada kesempatan berbeda anggota Komisi III Ruhut Sitompul mengatakan, siap memenuhi panggilan BK. Ia juga menyebut tidak melakukan pelecehan rasial seperti yang dituduhkan. “Aku maunya dipanggil biar aku terangin semua, kapanpun aku siap dipertemukan BK dengan Boni,” demikian Ruhut.

(iky)/foto: iwan armanias/parle.

## Komisi I DPR Terima Para Menlu Melanesia *Spearhead Group*

Pertemuan antara Komisi I DPR dengan para Menlu Melanesian *Spearhead Group* (MSG) membahas tentang kondisi politik di Papua dan Ambon, yang dipimpin Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiq berlangsung di ruang rapat Badan Kehormatan (BK) DPR Senayan Jakarta, Rabu (15/1) sore.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiq dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa Indonesia 3 bulan kedepan akan melaksanakan Pemilihan Umum Legislatif secara nasional termasuk di Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Dikatakan berdasarkan catatan tersebut jumlah pemilih tetap di Provinsi Papua dan Papua Barat berjumlah sekitar 6 juta orang.

Berdasarkan Pemilu 2009 lalu, jumlah pemilih yang datang ke TPS sekitar 60 persen, jika dibandingkan dengan Provinsi-Provinsi yang lain Indonesia angka 60 persen ini merupakan angka rata-rata partisipasi pemilih dalam setiap Pemilu.

Mahfudz Sidik menambahkan, untuk barometer sesungguhnya bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat di

Provinsi Papua dan Papua Baratini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi-Provinsi yang lain.

Sesungguhnya bahwa proses demokrasi dan komunikasi politik antara masyarakat Papua dengan pemerintah berjalan secara baik, meskipun didalam pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal atau daerah tentu ada sejumlah persoalan-persoalan yang harus diselesaikan.

Dia menjelaskan, bahwa MSG adalah organisasi negara-negara sub-kawasan dan etnis Melanesia yang beranggotakan Fiji, *Front de liberation Nationale Kanak et Socialiste* (FLNKS) Kaledonia Baru, Papua Nugini, Solomon Islands, dan Vanuatu.

Sub-kawasan Melanesian memiliki nilai penting kawasan Pasifik Selatan karena, di luar Australia dan Selandia Baru, 9- persen dari jumlah penduduk dan 95 persen dari GDP Pasifik Selatan berada di Sub-kawasan ini.

Dijelaskan juga terbentuknya MSG diawali dengan kesepakatan pembentukannya sebagai *political fathering* dian-



Pertemuan Komisi I dengan para Menlu Melanesia.

tara negara-negara etnis Melanesia yang dituangkan dalam “*Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia*” yang ditandatangani di Port Vila pada 14 Maret 1988.

Pada tahun 2007, MSG telah disepakati sebagai organisasi subregional yang dituangkan dalam “*Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group*”. Sebagai sebuah organisasi, MSG bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan, pertukaran budaya, dan kerjasama teknik guna mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, *good governance*, dan keamanan.

Sementara itu Ketua Delegasi MSG Ratu Inoke Kubuabola mengatakan telah melakukan kunjungan ke Papua dan diterima oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, dan segenap jajarannya. Kemudian para Menlu MSG juga berkesempatan mengunjungi Bank Papua dan Sekolah Menengah Kejuruan di Jayapura, dan dirinya menyatakan antusiasme yang be-

sar untuk meningkatkan hubungan dengan Papua, termasuk ingin belajar dari pengalaman Pembangunan Indonesia di Papua. Selain itu mereka juga berkesempatan melakukan perjalanan ke Ambon.

Dalam kunjungannya di Ambon, para Menlu MSG memperoleh paparan dari Pejabat Sementara Gubernur Maluku, Saud Situmorang, mengenai profil Maluku beserta potensi yang dimilikinya, juga melakukan kunjungan ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.

Delegasi MSG ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri dan kerja sama Internasional Fiji, Ratu Inoke Kubuabola yang didampingi anggota MSG lain antara lain, Rimbink Pato, Menteri Luar Negeri dan Imigrasi Papua Nugini, Soalaoi Clay Forau, Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Eksternal Solomon Islands, Yvon Faua, Wakil dari *Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste* (FLNKS) dan Duta Besar Kalipate Tavola. (spy)/foto:iwan armanias/parle/andri.

## DPR Dorong Pemerintah Jaga Volatilitas Rupiah

Dewan terus mendorong pemerintah untuk tetap menjaga volatilitas kurs Rupiah paling tidak mendekati Asumsi APBN tahun anggaran 2014.

Dalam kaitan tekanan terhadap rupiah, yang terjadi sepanjang tahun

2013. Dewan menyampaikan keprihatinannya. pasalnya rata-rata kurs rupiah sudah berada di level Rp. 12 ribu lebih jauh diatas patokan dalam APBN. “Pemerintah dan pelaku usaha perlu mewaspadaai dampak gejolak kurs rupiah terhadap perekonomian dalam

negeri,”terang Ketua DPR Marzuki Alie saat menyampaikan Pidato Pembukaan masa persidangan III, di Gedung Nusantara II, Rabu, (15/1).

Disisi lain, lanjut Marzuki, momen depresiasi rupiah terhadap dolar AS

dapat memberi peluang peningkatan ekspor non migas pada tahun 2014. “harga produk ekspor Indonesia cukup kompetitif di pasar internasional. Pemerintah harus mampu mencapai target ekspor non migas dalam tahun 2014 diatas 100 miliar dollar, sebagaimana yang pernah dicapai pada tahun 2012,” jelasnya.

Masih dalam kaitan dengan pelaksanaan APBN 2014, Dewan, paparnya, menaruh perhatian terhadap upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. “Setiap tahun pemerintah selalu mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur tetapi tetap belum memadai sebagaimana yang kita harapkan,” katanya.

Dia mengatakan, Dewan sudah mengetahui sasaran yang hendak dicapai dari prioritas infrastruktur 2014, tetapi dewan meminta pemerintah benar-benar melaksanakan kebijakan untuk mendukungnya, antara lain seperti pembangunan sarana dan prasarana penghubung antar dan menuju koridor ekonomi dan *virtual domestic interconnectivity*, mengurangi *backlog* dan *bottleneck* sektor transportasi, serta penuntasan pembangunan pembangkit listrik 10 ribu MWW tahap I dan II berikut jaringan transmisinya.

“Dewan meminta pemerintah meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur karena bersifat lintas sektor,” tambahnya. (si)/foto: eka hindra/parle/odjie.



Ketua DPR RI Marzuki Ali.

## Komisi VII DPR Sesalkan Terjadinya Kelangkaan Epiji 12 Kg



Wakil Ketua Komisi VII DPR Daryatmo.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Daryatmo menyesalkan sempat terjadinya kelangkaan elpiji pasca kenaikan harga

LPG 12 kg dilapangan. “Soal elpiji tidak boleh terjadi adanya kelangkaan ini terkait aspek penyediaan atau distribusi dilapangan,” ujar Daryatmo disela-sela Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Rabu, (15/1).

Menurut Daryatmo, Pertamina perlu sinkronisasi terkait pelaksanaan tugas Pertamina dalam menyalurkan subsidi dan aksi korporasinya. “Itu merupakan mata rantai yang berhubungan dengan Pertamina yang harus diawasi dengan baik oleh Komisi VII DPR agar alokasi subsidi tepat sasaran dan akses kemudahan bagi masyarakat memperolehnya,” terangnya.

Dia menegaskan, energi bagi masyarakat dan penduduk itu tidak boleh

bebas dan dilepas ke pasar. “Memang resiko dapat terjadinya gejolak dengan kelangkaan tersebut, hal itu harus dihindari,” jelasnya.

Daryatmo menambahkan, memang sudah ada catatan kerugian di tahun 2009 terkait bisnis gas rumah tangga dari Pertamina.

Karena itu, lanjutnya, perlu disusun sebuah skenario korporasi jangan sampai pemanfaatan momentum yang memiliki resiko tersebut digunakan sebagai celah untuk membuat masyarakat semakin gelisah akibat kenaikan harga tersebut. (si)/foto: iwan armanias/parle/hr.

## Komisi I Terpaksa Tahan Anggaran TVRI

Kisruh yang terjadi di manajemen TVRI menyebabkan Komisi I DPR RI terpaksa membintangi atau menahan anggaran RKA-KL TVRI tahun anggaran 2014. Sebabnya, Komisi I menduga adanya penyelewengan yang dilakukan oleh manajemen stasiun televisi tertua di Indonesia tersebut dalam penggunaan anggarannya.

Anggota Komisi I Tantowi Yahya menyatakan bahwa Komisi I hanya menahan belanja modal. Sehingga, untuk membuka blokir anggaran ini, TVRI harus membenahi manajemennya.

“Yang kami bintang itu adalah belanja modal, artinya

saat ini TVRI tidak bisa membuat program baru. Namun untuk belanja, gaji, listrik, dan sebagainya itu tidak dibintangi atau diblokir,” kata Tantowi yang ditemui Tim Parle sebelum Rapat Paripurna, Rabu (15/01).

Menanggapi dugaan adanya penyelewengan di internal TVRI, Tantowi menyatakan pihaknya sedang menindaklanjuti hal ini. Bahkan, ia menilai hal ini bisa mengarah ke tindakan pelanggaran hukum.

“Saat ini sedang ditindaklanjuti. Apabila terbukti melakukan penyelewengan dana, dimana dana tersebut adalah dana APBN, yang berarti itu notabene adalah dana rakyat, maka implikasinya adalah hukum,” tegas Politisi Golkar ini.

Politisi dari Dapil Sumatera Selatan ini menambahkan, informasi terkait dengan dugaan penyelewengan di TVRI berasal dari berbagai laporan yang masuk ke Komisi I DPR. Ia menduga, anggaran TVRI dikendalikan oleh seseorang yang bekerja sama dengan anggota Dewan Pengawas TVRI.

“Politisasi yang dilakukan TVRI berusaha mendapatkan simpati dari masyarakat, dimana rakyat tidak mengetahui adanya tindak penyelewengan dana yang terjadi di tubuh TVRI. Masyarakat tidak mengetahui adanya kebusukan internal TVRI yang mengecam Komisi I DPR RI,” tutup Tantowi. (sf,aw)/foto: iwan armanias/parle/hr.



Anggota Komisi I Tantowi Yahya.

## Timwas Century Segera Ambil Sikap



Anggota Timwas Century Fakhri Hamzah.

Berlarut-larutnya mega skandal Century menjadi pertanyaan banyak kalangan. Akan seperti apa akhir dari skandal yang melibatkan banyak nama pejabat penting ini. DPR lewat Tim Pengawas (Timwas) Century akan segera mengambil sikap.

perbankan ini juga diduga melibatkan Wakil Presiden Boediono yang saat itu menjabat Gubernur BI.

“Karena menyangkut uang yang banyak, pejabat yang besar, menyangkut kejahatan kerah putih yang dite-

Demikian ditegaskan Anggota Timwas Century Fakhri Hamzah (F-PKS), sesaat sebelum Rapat Paripurna DPR, Rabu (15/1). Fakhri bertanya, mengapa kasus yang begitu besar tidak mendapat prioritas penanganannya. Kasus ini seperti diketahui, telah merugikan negara hingga Rp 6,7 triliun. Tidak hanya itu, skandal

mukan oleh BPK, dan diaudit berkali-kali, mengapa kasus yang besar ini tidak diprioritaskan?” sesal Fakhri.

Kasus ini sudah masuk tahun keempat dan belum jelas penyelesaiannya di KPK. Dan Timwas sendiri, ingin segera meminta keterangan dari KPK, sejauh mana progres penyelesaian kasus Century ini. Timwas sendiri sudah bekerja sekian lama, tapi banyak orang yang dipanggil Timwas tidak mau datang. Ini tentu menghambat kerja Timwas. Termasuk Wakil Presiden Boediono yang tidak mau hadir ke Timwas, tentu menjadi persoalan tersendiri.

“Ini uangnya Rp 6,7 triliun, pejabat yang terlibat juga besar, apalagi? Kalau Timwas tidak bertindak, beginilah yang terjadi. Diulur-ulur. Hari senin (20/1) kita akan mengambil sikap untuk kelanjutan pemanggilan Pak Boediono, juga pemanggilan KPK tentunya. Kami ingin tahu kasus ini akhirnya sampai di mana,” ungkap Fakhri. (mh)/foto: iwan armanias/parle/hr.

# Pemprov DKI Diminta Tangani Daerah Aliran Hulu Sungai



Anggota Komisi V DPR Saleh Husin.

Terkait persoalan banjir yang melanda Provinsi DKI akhir-akhir ini, Anggota DPR dari Partai Hanura Saleh Husin mengharapkan Pemprov DKI lebih fokus dalam menangani persoalan banjir dengan melakukan koordinasi bersama pemerintah pusat mulai dari penanganan di sektor hulu

sungai.

“Misalnya Balai besar melakukan penanganan Daerah Aliran Sungai dengan melakukan normalisasi agar sungai tidak meluap,” ujarnya disela-sela Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Rabu, (15/1).

Di sisi lain, persoalan utama di DKI yaitu macet akibat banjir yang melanda. Semua itu, lanjutnya, harus disadari semua pihak termasuk masyarakat agar meningkatkan kesadarannya terhadap persoalan kebersihan di Daerah aliran sungai.

“Perlu Kesadaran dalam membuang sampah, artinya jangan buang sampah di sungai karena menghambat laju air di sungai yang berdampak meningkatkan potensi banjir,” terangnya.

Saleh mengatakan, perlu dipikirkan rencana pembuatan bendungan di hulu bogor, selain program normalisasi sungai yang sudah berjalan saat ini. “Pemprov juga tidak boleh berpangku tangan, segera sediakan pori-pori untuk menahan laju air,” katanya.

Dia menambahkan, pemerintah daerah harus segera membuat posko kesehatan dan dapur umum untuk menangani pengungsi korban banjir yang tengah melanda DKI Jakarta baru-baru ini. (si)/foto:iwan armanias/parle/hr.

# Presiden Kurang Perhatian Pada Bencana Sinabung

Gunung Sinabung di Sumatera Utara sudah sering erupsi. Penduduk setempat pun sudah sering kali mengungsi. Tapi, selama ini belum ada perhatian dari pemerintah pusat, terutama Presiden atas bencana erupsi Gunung Sinabung tersebut.

Demikian disampaikan Anggota DPR RI Hajriyanto Y. Thohari (F-PG) sesaat sebelum Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (15/1). Dulu, waktu letusan Gunung Merapi di Yogyakarta, Presiden sampai berkantor di lokasi bencana. Dalam kasus bencana ini, Presiden perlu memberikan perhatian simbolik kepada rakyat korban erupsi Sinabung. Untuk itu, ada desakan agar Presiden segera mengunjungi korban Sinabung, agar ada perhatian dari pemerintah



Anggota DPR RI Hajriyanto Y. Thohari (F-PG).

pusat.

“Presiden hadir saja, itu sudah memberikan makna simbolik yang besar.

Sehingga secara moral rakyat korban bencana Sinabung juga merasa diperhatikan dan merasa mendapatkan kepedulian. Itu sangat penting. Korban bencana alam itu akan mengalami perasaan putus asa, depresi, dan stres. Perhatian dari seorang kepala negara itu menjadi sangat penting,” tandas Hajriyanto.

Menurut Wakil Ketua MPR RI ini, betapa pun Gunung Sinabung masih pada tahap erupsi, Presiden tetap harus memberi perhatian. Walau hanya berkunjung sebentar, itu punya makna yang sangat positif bagi rakyat yang tertimpa bencana. Bagi rakyat, erupsi atau sudah meletus sama saja. Semua itu mengakibatkan rakyat mengungsi. Justru, lanjut Hajriyanto, saat erupsi



Gunung Sinabung sedang erupsi.

inilah ketidakpastian terus terjadi. Rakyat butuh perhatian lebih.

“Langkah-langkah simbolik dari seorang kepala negara dan para pemimpin negara ini justru semakin penting, karena dimensinya nanti sudah menyangkut pada persoalan yang sangat sensitif. Banyak sekali spekulasi politik yang akan muncul kalau perhatian simbolik dari Presiden

itu tidak dilakukan. Justru untuk menepis isu spekulasi seperti itu, maka kehadiran Presiden di lokasi bencana sangat penting. Karena sekali lagi akan memberi makna simbolik yang sangat besar,” tutur Hajriyanto.

Terhadap Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Hajriyanto juga menyampaikan kritiknya. BNPB, katanya, jangan terjebak pada legal

formal dalam menetapkan status bencana. Bantuan kemanusiaan harus segera dikirim, walau pun bencana Sinabung belum masuk kategori bencana nasional. “Menurut saya jangan terlalu bersikap legal formal. Rakyat, kan, tidak peduli ini sudah masuk bencana nasional atau belum. Yang dibutuhkan rakyat bukan status itu, tapi perhatian dan kepedulian,” papar Hajriyanto. (mh), foto: eka hindra/parle/od.

## Komisi V DPR Minta Banjir Ditangani Secara Komprehensif

Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said meminta penanganan banjir ditangani secara nasional dan diselesaikan secara komprehensif.

“Hal ini termasuk koordinasi antara Pemda DKI Jakarta, Jabar dan pemerintah pusat,” ujar Muhidin disela-sela Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Rabu, (15/1).

Menurutnya, masyarakat harus lebih disiplin dalam membuang sampah. Selain itu, maraknya bangunan liar di sekitar sungai membuat banjir semakin menjadi karena kurangnya daerah serapan.

Terkait pembangunan Monorail yang ditolak sebagian warga Lebak bulus, Muhidin mengatakan, pembangunan memang masih pro dan kontra termasuk soal ganti rugi. “Hal itu harus diperhatikan agar pembangunan terus berjalan, karena itu rakyat harus memahami semua demi kepentingan bersama,” ujarnya.



Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said.

### Bandara alternatif

Mengenai pengalihan sejumlah penerbangan bandara Soekarno Hatta ke Halim Perdanakusuma, lanjut Muhidin, merupakan solusi sementara pasalnya, masih banyak yang harus dibenahi di bandara Halim Perdanakusuma tersebut seperti lahan parkir, maupun infrastruktur menuju Halim.

“ini merupakan solusi sementara dan kita akan mendorong segera dicarikan solusi yang komprehensif, memang di Cengkareng masih adanya persoalan pembebasan lahan di sisi lain runway di sana hanya ada dua jalur,” terangnya.

Saat ini pergerakan pesawat di Cengkareng mencapai 70 pesawat perhari, selain itu, problemnya adalah Pembangunan bandara sudah tidak lagi mendapatkan tambahan APBN. “Kita mendukung penambahan anggaran bagi pembangunan bandara apabila pemerintah mencabut aturan tersebut,” jelasnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.

# DPR Surati Pemerintah Arab Saudi Terkait TKI *Overstayer*

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, DPR telah menyurati pemerintah Arab Saudi terkait TKI *overstayer* yang berada di tempat penampungan.

“Pemerintah Arab Saudi telah menyediakan empat pesawat dan Indonesia dua pesawat untuk memulangkan para TKI *overstayer* tersebut,” ujarnya.

Menurut Marzuki, pemulangan para TKI di Arab Saudi merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun DPR RI.

Pada kesempatan tersebut, anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka (Fraksi PDIP) mengharapkan dukungan DPR untuk memulangkan TKI yang meninggal dunia dan yang *overstayer* di Arab Saudi.



Pimpinan DPR RI saat memimpin Sidang Paripurna.

“Telah meninggal dunia Ibu Khodijah di Tempat Penampungan TKI Tahrir, Arab Saudi, karena itu kita minta bantuan DPR agar jenazah beliau dapat

segera dipulangkan segera. Serta para TKI yang masih berada di tempat penampungan,” tambahnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.

## DPR Diminta Cermati Temuan BPJS Centre



Anggota Komisi IX DPR Rieke Dyah Pitaloka.

Anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka (F-PPDIP) meminta DPR mendesak pemerintah untuk mencermati hasil temuan BPJS Centre. Pasalnya masih adanya masyarakat yang mengeluhkan kurangnya sosialisasi serta akses mereka dalam Jaminan Kesehatan.

“Dengan mencermati BPJS Centre diharapkan dapat mengakomodir masyarakat dalam mengakses Jaminan Kesehatan,” ujar Rieke saat Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie, Rabu, (15/1).

Berdasarkan pemantauan, terbatasnya petugas dan lamanya pelayanan pendaftaran anggota BPJS memang dikeluhkan masyarakat. Apalagi masih banyak pendaftar yang ternyata belum paham dengan persyaratan apa saja yang harus dibawa untuk mendaftar. Akibatnya terdapat beberapa peserta yang pulang kembali untuk melengkapi persyaratan yang belum lengkap.

Sebelumnya, pemerintah akhirnya melebur layanan kesehatan menjadi satu nama yaitu BPJS per 1 Januari 2014. Perubahan semua layanan kesehatan ini berlaku mulai dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Jaminan Persalinan (Jampersal), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). (si)/foto:odjie/parle/iw.



# Ketua DPR RI : Alokasi Kegiatan Dewan Fokus Laksanakan Fungsi Legislasi

DPR RI melaksanakan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2013-2014. Masa Sidang III ini memiliki 36 hari kerja, mulai hari ini sampai dengan 6 Maret 2014. "Dengan alokasi kegiatan lebih difokuskan kepada pelaksanaan fungsi legislasi," kata Ketua DPR Marzuki Alie saat menyampaikan Pidato Pembukaan, di Gedung DPR, Rabu (15/1).

Dalam masa sidang yang relatif pendek ini, Pimpinan Dewan mengajak para Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, dan seluruh Anggota Dewan, untuk tetap bersemangat dalam melaksanakan tugas guna mencapai target kinerja Dewan menjelang berakhirnya masa bakti DPR RI Periode 2009-2014.

Marzuki Alie Menyampaikan bahwa pada masa persidangan ini, pelaksanaan fungsi legislasi akan difokuskan untuk menyelesaikan 66 RUU yang sudah diputuskan menjadi RUU prioritas tahun 2014. RUU tersebut terdiri dari 34 RUU yang telah memasuki Pembicaraan Tingkat I, sisanya adalah RUU yang sedang dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR maupun dalam tahap penyusunan, baik di DPR maupun di Pemerintah dan DPD.

Di samping itu, ada beberapa RUU yang bersifat kumulatif terbuka, yaitu

RUU tentang pengesahan perjanjian internasional, RUU sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi, RUU berkaitan dengan APBN, dan RUU Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Provinsi/Kabupaten/Kota).

"Paling tidak 34 RUU yang sudah memasuki Pembicaraan Tingkat I, mampu diselesaikan pada periode DPR sekarang," tegasnya.

Selanjutnya, Marzuki meminta untuk meminimalisasi kendala dalam proses pembahasan, baik yang datang dari Dewan maupun kendala dari Pemerintah, khususnya masih adanya ketidaksepakatan mengenai substansi pokok. "Pimpinan mengharapkan kendala ini segera dilaporkan agar segera dicari solusi pemecahannya," katanya.

Sejumlah RUU yang segera dapat diselesaikan antara lain RUU tentang Keperawatan, RUU tentang Perdagangan, RUU tentang Perbankan, RUU tentang Perubahan Harga Rupiah, dan RUU tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Terkait RUU Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang ditangani oleh Komisi II, Marzuki Alie menjelaskan bahwa telah dibicarakan dalam Forum Rapat Konsultasi Pimpinan DPR, Ketua



Ketua DPR RI Marzuki Alie didampingi Wakil Ketua Priyo Budi Santoso.

Komisi II dan Kapoksi Komisi II dengan Menko Polhukam dan Mendagri.

Dalam Pertemuan tersebut dihasilkan kesimpulan antara lain Pemerintah bersama DPR akan melanjutkan proses pembahasan Pembentukan DOB dengan memprioritaskan daerah yang telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran. Pembahasan DOB akan dilakukan secara selektif serta mempertimbangkan urgensi dan kepentingan nasional, dan tidak mengganggu proses penyelenggaraan Pemilu. Sebelum melakukan pembahasan terhadap daerah-daerah yang memiliki masalah keamanan, Pemerintah diminta melakukan koordinasi dengan aparat keamanan setempat guna mendapat masukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. (as)/foto:iwan armanias/parle.

## Sekjen DPR RI Pimpin Apel Bersama

Di tengah guyuran hujan lebat, Pasukan pengamanan dalam (Pamdal) Sekretariat Jenderal DPR RI, Senin (13/1) tetap menggelar Apel Bersama Satuan Pengamanan Sekretariat Jenderal DPR/MPR/DPD-RI/POLRI.

Dalam sambutannya Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti sebagai Inspektur Apel mengatakan bahwa Apel hari ini merupakan apel perdana di tahun 2014. Memasuki tahun politik dimana Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan, maka DPR RI sebagai lembaga tinggi negara juga harus turut mempersiapkan hal tersebut.

"Persiapan yang dimaksud salah satunya adalah dalam hal pengamanan. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pesta demokrasi yang akan berlangsung beberapa bulan lagi ini, saya ingin memastikan dan menekankan kepada pengamanan dalam atau Pamdal beserta jajaran Kepolisian dari POLDA Metro Jaya dan TNI yang biasa melakukan pengamanan di kompleks gedung DPR RI untuk memperkuat pengamanannya," jelas Win, begitu ia biasa disapa.

Meski demikian dilanjutkan Win, pihaknya merasa be-



Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti memimpin Apel Bersama Satuan Pengamanan Setjen DPR/MPR/DPD/POLRI.

lum perlu melakukan penambahan personil Pamdal. Dengan Pamdal saat ini yang berjumlah 500 personil ditambah dengan bantuan pengamanan dari Pamobvit (Pasukan Pengamanan Obyek Vital) dari Polda Metro Jaya, dan jajaran TNI, Win meyakini bahwa seluruh personil dapat bekerjasama

mengamankan seluruh Kompleks Gedung DPR RI ini.

Pengamanan yang dimaksud tentu bukan hanya sebatas pengamanan di dalam Gedung DPR RI saja, melainkan juga pengamanan di rumah jabatan anggota DPR RI baik di Kalibata mau-

pun di Ulujami, serta Cikopo, Jawa Barat. Bahkan khusus untuk jajaran Kepolisian di Polda Metro Jaya, Win berharap agar memperketat pengamanan di sekitar jembatan penyeberangan depan gedung DPR RI, Senayan Jakarta.

“Kami mendapat laporan sudah beberapa kali pegawai atau karyawan DPR yang menjadi korban perampasan di jembatan penyeberangan depan gedung DPR. Karena itu bukan lagi dalam wilayah pengamanan Pamdal, maka kami meminta Kepolisian Polda Metro Jaya untuk meningkatkan pengamanan khususnya di sekitar jembatan tersebut. Agar tidak ada lagi korban perampasan dan kejahatan,” ungkap Win.

Dalam kesempatan itu Inspektur apel, beserta jajaran Kesetjenan DPR dan seluruh undangan yang hadir menyaksikan simulasi dari satuan anjing pelacak, serta atraksi konfigurasi baris berbaris dari salah satu kompi Pamdal DPR RI. (Ayu), foto : eka hindra/parle/ad.

## Ketua DPR Lantik Anggota Baru PAW

Ketua DPR Marzuki Alie didampingi Wakil Ketua DPR Sohibul Iman, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (15/1) melantik dan mengambil sumpah anggota pengganti antar waktu (PAW) Nur Baiti dari Fraksi Partai Demokrat (FPD). Nur Baiti menggantikan anggota FPD Drs. Yusran Aspar, Msi dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur.

Seusai dilantik, Nur Baiti berjanji akan menjalankan amanah dan bekerja dengan bagus meski waktu efektifnya tinggal beberapa bulan. Berdasarkan informasi yang diterima, ia akan menduduki Komisi IV DPR antara lain membidangi pertanian, kehutanan dan badan urusan logistik.

Ditanya soal misi yang akan diperjuangkan, ia mengatakan akan mempelajari dulu baru disampaikan dalam forum DPR. Tapi lanjutnya, apapun yang disampaikan Pemerintah Pusat, akan didukungnya.

Sedangkan menanggapi banyaknya



Ketua DPR Marzuki Alie didampingi Wakil Ketua Sohibul Iman melantik Anggota Pengganti Antar Waktu.

anggota DPR yang tersangkut masalah hukum, Nur Baiti menegaskan akan bekerja dengan jujur, melaksanakan tugas sesuai aturan. “Kita tidak harus bekerja dengan belok kiri-kanan, asal

lurus-lurus saja, apapun yang kita lakukan tidak masalah. Karena ini amanah rakyat akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Nur Baiti. (mp) foto : eka hindra/parle/odjie.

## Wakil Bicara

Dalam menyikapi bencana Gunung Sinabung termasuk bencana lainnya, DPR sudah membentuk UU Bencana Alam dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pertanyaannya, BNPB sudah turun belum? Terkait dengan bantuan, Kemensos sudah turun atau belum? Inilah yang diawasi oleh DPR. Kalau mau bentuk Posko, itu uang pribadi Anggota Dewan. Terkait kinerja BNPB, sering terlambat dan tidak terkoordinasi dengan baik. Tapi saya yakin, harusnya BNPB makin tahun semakin baik.



Ketua DPR Marzuki Ali.

Adanya usulan pemindahan Ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Tengah masih wacana. Menurut saya apapun yang direncanakan pemerintah bagus untuk kepentingan masyarakat, tidak masalah. Jadi usulan itu masih perlu dikaji lebih lanjut, karena Jakarta dikepung banjir, perlu pindah atau tidak. Itu perlu proses. Kalau ternyata baik, kita ikuti.



Anggota F-PD Nur Baiti.

Kami menyambut positif rencana pemerintah mengadakan tender terbuka ke seluruh maskapai penerbangan haji. Dengan demikian tidak hanya Garuda dan Saudi Arabia Airlines saja yang akan menangani penerbangan haji. Artinya disini akan terjadi kompetisi yang baik dalam hal pelayanan penerbangan kepada calon jemaah haji.



Anggota Komisi VIII Adang Ruchiatna Puradireja.

# Perlu Solusi Lebih Cerdas Atasi Banjir Jakarta



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

Ketua DPR Marzuki Alie mengakui, untuk mengatasi musibah banjir lebih sulit dari pada pencegahannya. Khusus di wilayah Jakarta memang sangat rentan sekali banjir karena faktor curah hujan dan tata ruang sangat buruk.

“Karena itu harus ada solusi lain yang lebih cerdas, untuk menyelesaikan masalah banjir di Jakarta,” tegas Ketua DPR di Jakarta, Rabu (15/1)

menanggapi terjadinya banjir tahunan yang terjadi awal pekan ini sehingga praktis ibukota dikepung banjir.

Untuk mencegah banjir yang makin meluas, pemerintah melakukan Operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC). Langkah itu dimaksudkan untuk mengurangi potensi banjir di Jakarta, bakal berlangsung sekitar dua bulan, yakni mulai 14 Januari hingga 14 Maret 2014. Operasi itu ditargetkan dapat mengu-

rangi potensi banjir hingga 30%.

“Dibutuhkan dana kurang lebih Rp 28 miliar untuk operasi modifikasi cuaca selama dua bulan,” jelas Kepala UPT Hujan Buatan BPPT Heru Widodo, Selasa (14/1).

Saat ditanya mengenai modifikasi cuaca ini dengan biaya Rp 28 miliar, Ketua DPR mengemukakan perlu dilihat keefektifannya. Apakah hujannya berhenti atau tidak. “Biaya sebesar itu kalau diberikan ke masyarakat tidak cukup juga. Sebab wilayahnya sangat luas dan warga yang menjadi korban juga tidak sedikit,” ungkap Marzuki.

Berdasarkan pengalaman yang lalu, pengalihan hujan dengan memodifikasi cuaca cukup berhasil. Dengan teknologi itu, hujan bisa dialihkan ke wilayah yang rendah dan tidak membawa dampak banjir khususnya di pemukiman. (mp), foto : eka hindra/parle/od.

## Komisi III Plenokan Putusan MK tentang Hakim Agung

Komisi III segera menggelar rapat pleno untuk membahas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus kewenangan DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon Hakim Agung. Rapat menurutnya akan mendengar sikap seluruh fraksi dan diharapkan dapat bermuara pada sikap resmi komisi hukum terhadap putusan tersebut.

“Kita ada rapat pimpinan dan pleno komisi untuk membahas substansi putusan MK beberapa waktu lalu. Harapannya kita dapat menetapkan sikap secara formal untuk menindaklanjuti putusan MK ini,” kata Ketua Komisi III Pieter C. Zulkifli kepada wartawan sebelum mengikuti rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/14).



Ketua Komisi III DPR Pieter C. Zulkifli.

Politisi FPD ini menolak memberikan jawaban ketika ditanya wartawan tentang kemungkinan DPR menolak keputusan MK tersebut. Ia menyebut langkah lain yang akan diambil komisi

yang dipimpinnya yaitu segera menjadwalkan rapat konsultasi dengan MK dan KY (Komisi Yudisial).

Seperti diketahui dalam sidang uji materi terhadap 4 pasal dalam UU MA dan UU KY, majelis hakim MK mengabulkan seluruh permintaan pemohon. Kewenangan DPR untuk melakukan fit and proper test calon Hakim Agung dicabut. Wakil rakyat di Senayan hanya perlu menyetujui atau menolak calon yang disampaikan KY.

MK juga memutuskan KY tidak perlu lagi mengirim 3 kandidat Hakim Agung untuk dipilih 1 orang oleh DPR. KY hanya perlu mengirim 1 orang calon Hakim Agung untuk 1 lowongan yang kemudian disikapi DPR dengan menerima atau menolak. (iky) Foto: iwan armianas/parle/od.



# Pusat Pemerintahan Sebaiknya Dipindah

Menyusul banjir yang terus menyerang Jakarta setiap tahun, sudah saatnya memikirkan pemindahan pusat pemerintahan ke daerah lain di luar Pulau Jawa. Sebagai pusat bisnis dan pemerintahan, Jakarta sudah terlalu sempit dan padat.

Demikian disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie kepada para wartawan saat dimintai komentarnya soal banjir di Ibu Kota. Ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/1), Marzuki menyatakan, apa yang dahulu diprediksi oleh ilmuwan Ir. Sutami bahwa Pulau Jawa kelak akan tenggelam karena padatnya penduduk, perlahan bisa menjadi kenyataan. Dan salah satu wacana lama adalah memindahkan Jakarta ke Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kalteng selain datarannya tinggi, juga terbebas dari banjir dan bahaya gempa. Wacana lama ini mungkin menjadi sangat relevan untuk diperbincangkan lagi saat ini. “Dulu yang diprediksi oleh Ir. Sutami, Jawa ini akan tenggelam kalau dibiarkan terus orang-orang dari luar Jawa mengalir ke Jawa,” kata Marzuki.

Ada persoalan yang sangat substansial yang harus dipikirkan ke depan, pembangunan itu harusnya lebih merata ke seluruh wilayah Republik Indonesia ini, sehingga ruang kerja dan kesempatan kerja bagi anak bangsa tidak hanya ada di Jawa atau Jakarta. Tapi, terbuka lebar di seluruh wilayah Republik ini.

Sebagai Ibu Kota, Jakarta mungkin saja dipertahankan. Tapi, sebagai pusat pemerintahan bisa dipindahkan ke pulau lain. Ini merupakan wacana tata ruang, agar Jakarta tidak kelebihan beban, sehingga terbebas dari banjir dan



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

kemacetan. Jakarta, lanjut Marzuki, cukup sebagai pusat bisnis saja. Kalau pusat pemerintahan sudah pindah, menatanya pun lebih mudah. Pemerataan pembangunan akan sangat terlihat di seluruh daerah di Indonesia.

“Jadi, kalau kita berpikir Indonesia, kita tidak seharusnya berpikir Jakarta. Mari kita berpikir bagaimana mengurangi beban Jawa. Kalau tidak, ya betul-betul ramalan Sutami akan menjadi kenyataan. Jawa ini akan tenggelam dan separuh rakyat Indonesia akan hilang kalau tenggelamnya mendadak,” ungkap Marzuki.

Menghidupkan wacana ini di tengah kepongkan banjir Jakarta menjadi keniscayaan. Jakarta sudah sangat ruwet dengan menumpuk pusat pemerintahan dan bisnis. Di negara-negara lain di dunia, pusat pemerintahannya terpisah dari pusat bisnis. “Jakarta sudah tidak sehat. Padatnya luar biasa,” keluh Marzuki. Menyelesaikan banjir di Jakarta, memang, harus holistik tidak bisa sektoral. Sementara penyelesaian yang ada, menurut Marzuki hanya tambal sulam. (mh), foto : eka hindra/parle/od.

## Sosialisasi JKN Belum Masif

Menyusul peralihan penggunaan Jamkesmas ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang penuh masalah, diakui banyak pihak sebagai risiko masa peralihan. BPJS Kesehatan sendiri sebagai lembaga pelaksana JKN belum masif melakukan sosialisasinya, sehingga banyak keluhan dari masyarakat miskin.

Demikian disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie usai menerima Kepala BPJS Kesehatan Fahmi Idris dan ma-

sarakat miskin pengguna layanan kesehatan, Kamis (16/1). “Tentu sudah kita prediksi situasi ini, karena yang masuk BPJS Kesehatan pada tahap awal saja sudah 116 juta orang. Pasti ada persoalan tentang kepesertaan. Peralihan itu pasti ada persoalan, baik peralihan dari Askes, Jamkesda, Jamkesmas, Jamkostek, dan KJS,” kata Marzuki.

Lagi-lagi soal sosialisasi jadi masalah di awal pemberlakuan JKN oleh BPJS Kesehatan. Sejak UU BPJS disahkan,

DPR RI sebenarnya sudah melakukan sosialisasi. DPR mengawal betul pelaksanaannya. Dari DPR-lah semua produk UU dihasilkan. Dengan begitu DPR juga ikut menyukseskan program kesehatan yang melayani kesehatan rakyat Indonesia.

Bila masih ditemukan masalah layanan kesehatan di tahun pertama ini, sangat wajar terjadi. “Tentu peralihan ini ada masalah, karena sosialisasinya memang belum masif dilakukan oleh

BPJS Kesehatan, walaupun secara formal DPR juga sudah melakukan sosialisasi sejak UU ini disahkan,” ungkap Marzuki.

Banyaknya keluhan rakyat miskin yang dahulu mudah mengurus kartu sehat sekaligus mendapat layanan kesehatan gratis, tentu harus diterima dengan baik oleh pemerintah dan DPR. Ini menjadi bahan evaluasi ke depan, agar rakyat miskin betul-betul diutamakan dalam menerima layanan kesehatan. “Saya terima semua berbagai persoalan masyarakat pengguna kartu sehat. Itu sudah mewakili



Ketua DPR saat menjawab pertanyaan wartawan.

semuanya. Dan itu jadi masukan bagi BPJS Kesehatan untuk membuat kebijakan yang bisa menyelesaikan secara

nasional,” tutur Marzuki.

Soal Sikap BPJS Kesehatan sendiri saat menerima banyak keluhan, diakui Marzuki sudah sangat bagus. BPJS Kesehatan, katanya, sudah melayani pengaduan masyarakat dengan menyediakan nomor *hotline* di 500400. Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah menyediakan posko di kantor BPJS di kawasan Cempaka Putih, Jakarta. Masyarakat bisa pula mengunjungi web BPJS Kesehatan untuk sampaikan pengaduan. Pada awal pemberlakuan JKN, ada ribuan yang mengadu soal layanan kesehatan ini. (mh) foto : HR/parle/odjie.

## Indonesia Perlu Siapkan Industri Singkong

Singkong Indonesia dilirik China. Selain komoditas yang satu ini melimpah di Tanah Air, singkong Indonesia juga diakui China sangat baik kualitasnya. Untuk itu, Indonesia perlu segera menyiapkan infrastruktur industrinya, karena singkong bisa dijadikan bahan dasar gas etanol di China.

Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron menyampaikan hal tersebut usai mendampingi Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima Mr. Chai *President of China Food Industry Corp*, Kamis (16/1). Dalam pertemuan dengan Ketua DPR, Chai mengungkapkan, China tertarik pada produk singkong Indonesia yang ternyata sangat berkualitas. Singkong Indonesia diharapkan bisa menggantikan produk singkong Thailand yang selama ini masuk ke China.

Soal tawaran menarik ini, Herman berkomentar, “Kalau ada kekhususan kerja sama di bidang singkong, faktor utama dibangun dulu pabriknya. Secara kultural, tanaman singkong sudah menjadi budaya masyarakat kita. Menjadi gapplek itu sudah biasa diproduksi masyarakat. Yang tidak biasa, dari gapplek menjadi tepung tapioka dan etanol.”

Menurut Herman, harus ada komitmen kuat untuk mengembangkan singkong menjadi kebutuhan industri. Singkong adalah komoditas yang biasa ditanam masyarakat Indonesia. “Jadi singkong ini bagian dari tanaman kultural. Kalau mau dikembangkan ke sektor industri, saya kira tinggal komitmen industrinya,” kata Herman.

Pengembangan tanaman singkong menjadi tanaman industri tentu akan memberi nilai tambah petani kita. Hanya saja, lanjut Herman, untuk tanaman singkong tidak bisa dibuka areal khusus, karena sudah dibatasi oleh tanaman kultural, seperti padi dan jagung. “Secara budaya kita punya pola tanam tertentu. Padi menjadi tanaman utama. Yang kedua jagung, dan yang ketiga sektor hortikultura.”

Sementara mengomentari kerja sama investasi di bidang



Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron.

CPO dengan China, menurut Herman, ini bisa menjadi sebuah terobosan baru. Selama ini, kerja sama CPO hanya *business to business* (B to B) dengan menjual CPO ke pasar Eropa atau Amerika. Butuh regulasi baru soal ini. “Selama ini CPO dibangun secara B to B. Saya kira harus ada regulasi baru. Kami sedang merevisi UU perkebunan,” ungkap Herman.

Bila ada kerja sama investasi CPO antarnegara, maka perlu ada pengawasan yang ketat. Soal pembukaan lahan baru untuk kerja sama investasi ini kemungkinan besar harus membuka kembali areal hutan yang dikuasai Kemenhut. Ada mekanisme tersendiri bahwa untuk lahan-lahan potensial dan pengembangan budidaya yang menguntungkan bagi rakyat, Kemenhut masih bisa membuka areal hutannya. “Selama ini, sebagian besar pengembangan CPO merupakan alih fungsi dari kawasan hutan. Dan ini melalui mekanisme tata ruang wilayah provinsi.” (mh) foto : rizka/parle/hr.

# China Ingin Investasi Pangan Di Indonesia



Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima MR. Chai President Of China Food Industry Corp.

Bisnis makanan dan minuman di China berkembang sangat pesat. Dan China melirik Indonesia sebagai negara yang sangat potensial untuk diajak bekerja sama di bidang pangan. Kebetulan investasi asing untuk bidang pangan di Indonesia belum banyak tersentuh.

Demikian terungkap dalam pertemuan Ketua DPR RI Marzuki Alie dengan MR. Chai *President Of China Food Industry Corp*, Kamis (16/1). Keinginan China tersebut disambut baik Ketua DPR. “Pada prinsipnya kita terbuka terhadap investasi asing. Dengan catatan, investasi jangan hanya menguntungkan satu pihak, tapi kedua pihak, khususnya keuntungan bagi rakyat Indonesia,” tandasnya dalam pertemuan tersebut.

Investasi di bidang pertanian dan perkebunan bisa segera dijajaki dengan China. Apalagi, pangan Indonesia sebagian besar masih impor. Hanya saja, persoalan krusial di Indonesia adalah lahan yang kian sempit. Bila investasi China masuk, berarti harus membuka lahan baru atau memanfaatkan lahan lama dengan optimal. Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, bila memang menguntungkan, pihaknya bisa segera memfasilitasi investasi China tersebut di Tanah Air.

Mr. Chai berharap, kerjasama investasi ini bisa segera terwujud, karena punya keuntungan yang besar bagi kedua belah pihak. Ada banyak tawaran investasi seperti kelapa sawit dan ubi kayu. Selama ini hanya ada

investasi Malaysia untuk Kelapa Sawit. Marzuki berharap, bila ingin kerja sama investasi di bidang pertanian, harus menyertakan para petani agar mereka betul-betul diuntungkan.

Di lain pihak, Mr. Chai juga menawarkan Indonesia untuk mengekspor singkong ke China. Kebutuhan China terhadap singkong sangat besar, bisa mencapai 7 juta ton per tahun. Sementara untuk menutupi kebutuhan singkong, pemerintah China mengimpor dari Thailand. Dia berharap, Indonesia bisa menggantikan impor singkong Thailand untuk China. Singkong Indonesia, diakui Mr. Chai, sangat baik. Singkong tidak saja untuk pangan, tapi juga bisa untuk etanol. (mh), foto : rizka/parle/hr.

## Komisi VIII Dorong Kemenag Lobi Pemerintah Arab

Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Agama untuk melakukan lobi kepada Pemerintah Arab Saudi untuk meminimalisir pemotongan kuota haji tahun 1435 H/2014 M. Hal tersebut menjadi salah satu isi dari kesimpulan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Suryadharma Ali, Kamis (16/1).

“Setelah kami melihat secara langsung dan kami evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2013 kemarin, sebenarnya pemerintah Arab tidak perlu melakukan pemotongan kuota haji Indonesia. Karena setelah dilihat ternyata area Masjidil Haram masih luas dan cukup untuk jamaah haji Indonesia tanpa harus dilakukan pemotongan kuotanya. Oleh karena itu kami mendorong kepada Kementerian Agama untuk terus melobi pemerintah Arab Saudi agar tidak dilakukan pemotongan kuota haji di tahun ini,” jelas Wakil Ketua Komisi VIII, Mahrus Munir usai rapat.



Wakil Ketua Komisi VIII, Mahrus Munir.

Sementara itu Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan bahwa dalam minggu-minggu ini pihaknya akan kembali ke Arab Saudi untuk melobi pemerintah Arab agar tidak memotong kuota haji Indonesia. Selain itu, dalam penyusunan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) 1435/2014M

Kementerian Agama mengajukan dua skenario yakni Kuota dasar 211 ribu dan pemotongan 20 persen dari Kuota Dasar. Hal tersebut mengingat keputusan kuota haji belum akan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi hingga penyelesaian pembahasan di DPR.

Mengenai dua skenario tersebut, Mahrus menyambut positif. Hal itu untuk mengefisienkan kerja, ketika lobi Kemenag oleh pemerintah Arab atas kuota haji Indonesia diterima maka bisa menggunakan yang kedua. Namun ketika lobi tersebut gagal, maka bisa digunakan skenario pertama dalam pembahasan BPIH Tahun 2014.

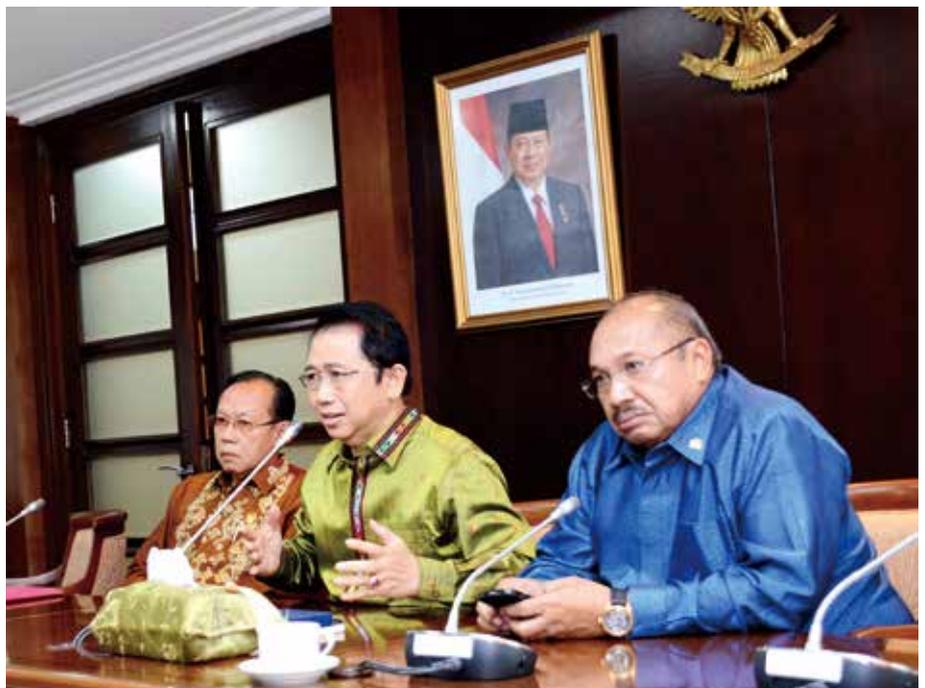
“Dengan adanya dua skenario tersebut akan mengefisienkan kerja. Sehingga tidak ada pembahasan ulang seperti pada tahun lalu yang cukup menyita waktu,” ungkap Mahrus. (Ayu)  
Foto: HR/parle/andri.

## Ketua DPR Terima Keluhan Masyarakat Soal JKN

Masa transisi pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menyisakan banyak masalah di tengah masyarakat miskin. Mereka yang dahulu berobat gratis dengan menggunakan Kartu Jakarta Sehat (KJS), kini tak bisa lagi seiring pemberlakuan JKN oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Demikian keluhan mayoritas masyarakat miskin yang disampaikan langsung kepada Ketua DPR RI Marzuki Alie, Kamis (16/1). Mereka sengaja diundang Ketua DPR untuk menyampaikan persoalan menyangkut layanan kesehatan di beberapa rumah sakit sejak ada program JKN. Beberapa rumah sakit, seperti diungkapkan masyarakat miskin tersebut, tidak mau lagi melayani KJS, Jampersal, atau Jamkesmas.

Yati Yuningsih, misalnya, penderita



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat mendengar keluhan masyarakat kurang mampu.

kanker payudara, sudah mendapatkan layanan yang sangat baik ketika masih menggunakan KJS. Kanker yang diderita ibu 48 tahun ini sudah stadium 4. Bila dihentikan pengobatannya akan memperparah penderitanya. Ketika JKN diberlakukan, rumah sakit sudah tidak mau lagi menerima Yati. Dan kini, ia berhenti berobat. Inilah sepeggal persoalan yang ada di tengah masyarakat.

Selain masyarakat miskin yang datang berbondong-bondong menemui Ketua DPR, hadir pula Kepala BPJS Kesehatan Fahmi Idris untuk sama-sama mendengarkan keluhan masyarakat miskin. Para pemegang kartu Jamsostek juga masih belum bisa terlayani dengan baik. Dan pihak rumah sakit pun tidak bisa disalahkan sebagai *provider*, karena hanya bisa menjalankan aturan main yang sudah digariskan BPJS Kesehatan.

Menurut Ketua DPR Marzuki Alie, sangat wajar di masa awal transisi ini banyak terjadi kesalahan layanan, bahkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Sosialisasi JKN,

diakui Marzuki agak terlambat, karena menyangkut kawasan Indonesia yang sangat luas dan tingkat pendidikan masyarakatnya yang beragam.

Keluhan masyarakat ini harus menjadi catatan penting bagi BPJS Kesehatan untuk kemudian berkoordinasi kembali dengan penyedia layanan kesehatan. “Pengaduan harus segera ditindaklanjuti BPJS. Namun, perlu juga kesabaran masyarakat di masa transisi ini,” kata Marzuki.

Sementara Kepala BPJS Kesehatan Fahmi Idris, menyatakan, akan betul-betul memperhatikan keluhan masyarakat miskin ini. Soal rumah sakit yang menolak layanan kesehatan bagi masyarakat pengguna kartu kesehatan lama, perlu dipastikan dahulu, apakah rumah sakit itu merupakan rekanan BPJS sebagai pelaksana JKN. Bila rumah sakit merasa biaya untuk layanannya kurang, BPJS tak segan-segan mendatangi langsung dan menghitung kekurangan biaya itu bersama-sama. (mh) foto : eka hindra/parle/odjie.

## Perlunya Atase Agama di Luar Negeri

Anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nurwahid mendorong Kementerian Agama untuk membentuk Atase Agama di negara-negara tertentu. Hal tersebut diungkapkan politisi dari Fraksi PKS dalam rapat kerja dengan Menteri Agama, Suryadharma Ali, Kamis (18/1).

“Di negara yang banyak terdapat TKI (Tenaga Kerja Indonesia) seperti Hongkong, Malaysia dan beberapa Negara lain-lain, tidak sedikit timbul masalah keagamaan. Oleh karena itu saya menyarankan agar Kementerian Agama membentuk Atase Agama di Negara-negara tertentu,” ungkap Hidayat Nurwahid.

Dilanjutkannya, permasalahan keagamaan yang dimaksud seperti pernikahan, serta pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianut. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya tenaga pembimbing agama. Akibatnya tidak sedikit Warga Negara Indonesia yang mendapat pendidikan agama yang tidak sesuai dengan agama yang dianut.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama Suryadharma Ali menyambut positif usulan tersebut. Bahkan Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat yang ikut mendampingi Menteri Agama saat berlangsungnya rapat kerja ini



Anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nurwahid.

menambahkan bahwa selama ini tugas bimbingan atau pendidikan keagamaan kerap digantikan oleh Kedutaan Besar Indonesia di Negara tersebut. Sayangnya tidak semua Kedubes RI memiliki ahli agama sesuai dengan agama yang dianut oleh WNI. Oleh karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar negeri untuk membicarakan rencana pembentukan Atase

Agama tersebut.

“Jika Kemenag berkoordinasi dengan Kemenlu. Maka mengingat pentingnya atase agama tersebut, kami juga akan ikut mendorong dan bicarakan dengan teman-teman di Komisi I yang membidangi luar negeri,” tambah Hidayat. (Ayu) Foto: HR/parle/andri

# Ketua DPR Terima Dubes RI untuk Federasi Rusia



Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia.

Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia Djauhari Oratmangun. Kunjungan ini dalam rangka rencana kunjungan yang akan dilakukan oleh Ketua Parlemen Belarusia ke Indonesia pada 24 Februari 2014 mendatang.

“Ketua Parlemen Belarusia akan hadir di Indonesia pada akhir Februari nanti, untuk melakukan kunjungan, dimana beberapa waktu yang lalu saya mendapat undangan ke Belarusia. Kunjungan ini konteksnya hanya mempererat hubungan kedua negara,” jelas Marzuki dari ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Kamis (16/01).

Politisi Demokrat ini menambahkan, Ketua Parlemen Belarusia akan bertemu dengan Ketua DPR, Ketua MPR, dan Ketua DPD, termasuk Presiden Republik Indonesia.

“Kunjungan ini juga dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, sebagaimana kunjungan beberapa waktu yang lalu, saya juga bertemu dengan Presiden Belarusia,” tambah Marzuki.

Djauhari membenarkan bahwa kunjungan Ketua Parlemen Belarusia ke Indonesia sebagai kunjungan balasan Ketua DPR RI yang tahun lalu berkunjung ke Belarusia.

“Kedatangan Ketua Parlemen Belarusia ke Indonesia sebagai kunjungan balasan Ketua Parlemen Indonesia ke Belarusia pada bulan Mei tahun lalu. Dalam kunjungan ini, Ketua Parlemen Belarusia akan datang dengan pimpinan dan beberapa anggota, serta membawa beberapa *businessman* yang cukup besar dari Belarusia,” kata Djauhari.

Djauhari berharap, kunjungan ini akan mempererat hubungan bilateral kedua negara, termasuk hubungan antar parlemen. Selain itu, hubungan kedua negara dapat memberikan manfaat masyarakat Indonesia.

“Penekanannya akan kepada hubungan kerjasama bilateral kedua negara dan antar parlemen. Diharapkan, kerjasama ini memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia secara langsung. Dalam konteks itulah, hubungan di bidang ekonomi dan investasi akan menjadi bagian yang signifikan,” imbuh Djauhari. (sf) Foto: HR/parle/odjie\*.

## BK DPR :

# Masyarakat Jangan Pilih Anggota yang Malas



Ketua Badan Kehormatan DPR Trimedya Panjaitan menjawab pertanyaan wartawan.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Trimedya Panjaitan memberi perhatian terhadap sorotan sejumlah pihak terkait kemungkinan menurunnya tingkat kehadiran anggota dewan menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April yang akan datang. Ia mengingatkan sanksi yang paling efektif bagi anggota dewan yang pemalas adalah jangan dipilih lagi.

“Harapan kita kepada masyarakat, lihatlah, anggota DPR yang malas jangan dipilih lagi, harus ada sanksi dari masyarakat jangan dipilih lagi,” katanya kepada wartawan sebelum mengikuti rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/14).

Ia menambahkan BK akan terus melaporkan kepada publik mengenai kehadiran anggota dewan terutama dalam rapat paripurna. Politisi FPDIP ini mengingatkan sesuai dengan tata tertib yang telah disepakati, BK baru dapat memberikan sanksi kepada anggota yang tidak hadir dalam rapat paripurna 6 kali berturut-turut.

“Data yang kami punyai 80 persen anggota yang tidak hadir melengkapi dengan surat izin. Terus kalau ada yang tidak hadir 5 kali berturut-turut kemudian pada rapat yang keenam datang, kita mau buat apa. Sesuai tatib ini tidak bisa ditindak,” paparnya.

Pada bagian lain ia menekankan perlu langkah terobosan agar 3 bulan penting menjelang pemilu, Januari-Maret, Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan BK dapat melaksanakan pertemuan untuk menentukan langkah yang dapat diambil agar target kerja dewan tetap berjalan.

“Perlu langkah terobosan, Pimpinan Fraksi, Pimpinan DPR, Pimpinan BK harus ketemu membicarakan bagaimana mengatasinya. Soal Prolegnas kita harus realistis mana saja yang bisa diselesaikan. Kemudian harus dicari terobosan seperti apa, menyangkut kuorum. Jangan sampai tersendat semua proses legislasi dan pengawasan di DPR,” pungkas Trimed. *(iky)/foto:iwan armanias/parle/hr.*



Ketua DPR RI Marzuki Ali didampingi Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman melantik dan mengambil sumpah Anggota Pengganti Antar Waktu DPR RI Nur Baiti dari Fraksi Partai Demokrat menggantikan Yusran Aspar dari Dapil Kaltim, Rabu (15/1) Foto: HR/Parle/odjie\*.



Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI dipimpin Roem Kono saat meninjau lokasi pembangunan Bendung Bayang Bayang di Bulukumba, Rabu (11/12) Foto: SC/Parle.



Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI dipimpin Roem Kono saat meninjau lahan lokasi akan dibangunnya bandara perintis Bulukumba, Rabu (11/12) Foto: SC/Parle.



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti didampingi Karo Umum Mardian Umar memimpin Apel Bersama di halaman Gedung Nusantara III DPR RI, Senin (13/1) Foto: HR/Parle/andri\*.

